

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelombang reformasi yang bergulir dan mengemuka sejak tahun 1998, yang dipicu oleh adanya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 mengantarkan semakin menguatnya tuntutan akan kebebasan dan pengakuan terhadap eksistensi daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, menyatakan bahwa, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, maka semakin menguatnya tuntutan daerah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi dan kemandirian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan ini terdapat satu persamaan dalam hal anggaran, yaitu setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan "penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

memutuskan : bahwa Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah direvisi menjadi Undang-undang No.33 tahun 2004. Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No.33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena makna Substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

Pembangunan sebagai suatu proses yang menghendaki terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi akan tercapai jika dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemberian otonomi pada daerah paling tidak dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Pemberian otonomi pada daerah pada prinsipnya terkandung beberapa tujuan pokok yaitu: 1) mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 3)

mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya dan
4) mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan prinsip pokok yang terkandung dalam otonomi daerah, pemberian otonomi dirasa sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan pembangunan yang menghendaki adanya peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, mampu mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut melalui peningkatan sumber penerimaan daerah, pengembangan dunia usaha daerah, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Pesatnya pembangunan di daerah mengharuskan daerah memperbaiki semua aspek yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu aspek perlu diperbaiki terus ditingkatkan adalah aspek keuangan (fiskal). Keuangan sebagai unsur penting dalam mendukung kegiatan pembangunan harus terus dijaga dan ditingkatkan ketersediaannya. Ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan akan mempercepat proses kegiatan dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Semakin baik atau besar keuangan daerah,

maka akan semakin stabil pula kedudukan pemerintah, semakin efektif dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan.

**Tabel I.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Pulau Jawa
Tahun 2010-2012**

Provinsi	2010	2011	2012
DKI Jakarta	11.824.970.000.000	16.022.580.846.665	18.685.000.000.000
Banten	1.607.549.000.000	2.079.096.634.850	2.981.553.000.000
Jawa Barat	5.622.864.544.262	6.316.399.881.774	8.176.352.694.291
Jawa Tengah	3.729.061.655.000	4.182.627.057.000	5.799.955.330.000
Jawa Timur	5.143.999.228.183	7.615.042.879.117	9.068.160.048.588
Yogyakarta	621.738.059.309	700.339.191.807	800.156.497.767

Sumber : Dirjen Keuangan Daerah. Kemendagri, diolah

Tabel I.1 menunjukkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, secara umum pendapatan asli daerah di Pulau Jawa mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2010-2012. Pada tahun 2012 PAD terbesar berada di provinsi DKI Jakarta dan terkecil ada di provinsi Yogyakarta. Namun provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang di posisi ketiga belum mampu meningkatkan PAD-nya karena hanya berada di posisi kelima, sedangkan secara ekonomi Banten memiliki potensi yang cukup besar.

Salah satu provinsi yang menerapkan otonomi daerah yaitu provinsi Banten, Banten terbilang masih muda umurnya karena baru berdiri pada tahun 2000. Provinsi Banten terbentuk dari pemisahan provinsi lain. Berdasarkan keputusan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten dipisahkan dari provinsi asalnya Jawa Barat. Sebuah provinsi seharusnya telah memiliki kemandirian untuk membiayai kebutuhannya sendiri termasuk mampu menciptakan sumber ekonomi yang bisa membiayai seluruh kebutuhan penduduk maupun pemerintah provinsi, salah satunya dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga provinsi tersebut diharapkan mampu mandiri. Apalagi sebagai sebuah provinsi baru, dimana negara sudah percaya pada kemampuan daerah tersebut untuk bisa hidup mandiri sehingga bisa lepas dari pemerintahan provinsi asalnya, seperti provinsi Banten. Banten yang beribukota di kota Serang, memiliki luas wilayah 9.160,70 km² yang terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Wilayahnya terkecil nomor lima di Indonesia setelah provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Luas ini terbilang cukup kecil untuk sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki sebagian besar memiliki luas puluhan hingga ratusan ribu km².¹

Padahal potensi-potensi yang di miliki oleh provinsi Banten sangatlah banyak, beberapa tempat penting sebagai sumber ekonomi terletak disana seperti Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan gerbang masuknya barang dan penumpang ke Indonesia, pelabuhan Merak di selat Sunda yang merupakan jalur lalu lintas strategis yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatra serta menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, dan beberapa stasiun kereta api yang menghubungkan berbagai provinsi di pulau Jawa. Banten juga memiliki kawasan wisata yang sudah terkenal

¹ "Potensi Alam dari Provinsi Banten" <http://www.scribd.com/doc/47772555/bab1-surcon> (diakses tanggal 23 April 2011)

di tingkat nasional maupun internasional seperti Taman Nasional Ujung Kulon, dan Gunung Krakatau. Dan yang tak kalah penting adalah Banten memiliki kawasan yang merupakan penyangga bagi Jakarta yaitu kota Tangerang dan kabupaten Tangerang yang sekaligus merupakan kawasan industri di Indonesia. Namun karena provinsi Banten masih baru di Indonesia maka banyak hal-hal yang menyebabkan menurunnya sumber-sumber penerimaan daerah di provinsi Banten yaitu, jumlah penduduk, sumber pendapatan baru dan PDRB.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penyebab yang menentukan tingkat tinggi atau rendahnya pendapatan suatu daerah, sebab semakin besar peningkatan jumlah penduduk maka semakin besar pula meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut. Sebab pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penyumbang PAD terbesar berasal dari sektor pajak, salah satunya dari pajak yang diambil langsung oleh provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Banten merupakan daerah yang sedang berkembang maka penduduk akan membutuhkan kendaraan pribadi baik yang kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, hal ini dikarenakan mobilitas di daerah Banten sangat cepat.

Pengaruh jumlah penduduk pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara maju maupun negara yang sedang

berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologinya. Faktor penduduk juga dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Terdapat juga faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber pendapatan baru. Yang dimaksud dengan sumber pendapatan baru adalah adanya kegiatan usaha baru yang dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak dan retribusi yang sudah ada, misalnya usaha persewaan computer atau internet dan lain-lain. Banyak di kota-kota penyanggah yang dekat dengan kota besar mempunyai banyak sumber pendapatan baru terutama dari sektor teknologi yaitu rental computer atau internet bahkan merambah ke sektor automotif seperti rental mobil dan banyaknya bengkel mobil atau motor yang merupakan sumber pendapatan baru di kota-kota penyanggah yang dekat dengan kota besar.

Salah satu faktor berikutnya yang sangat penting yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini disebabkan PDRB merupakan salah satu tolak ukur

dalam meningkatnya pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Agus Suherman, Kepala Badan Pusat Statistik Pusat, Jumat (13/11) di Banten mengatakan, "Target pertumbuhan ekonomi dalam APBD adalah 3,25 persen sampai 4,75 persen pada tahun ini. Target moderatnya adalah 4,24 persen". Agus optimistis pertumbuhan ekonomi Banten pada akhir tahun ini mencapai lima koma. Adapun secara kumulatif, produk domestik regional bruto atau PDRB Banten selama triwulan I-III 2009 tumbuh sebesar 5,11 persen.²

Sekedar diketahui, PAD Banten 2012 mencapai sekitar Rp 2,9 triliun. Sedangkan, pada APBD Banten 2013, PAD ditargetkan mencapai Rp 3,5 triliun. "Kami ingin agar peningkatan Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten juga berbanding lurus dengan peningkatan PAD," ungkap anggota Komisi III DPRD Banten Budi Prajogo kepada wartawan di DPRD Banten.³ Dalam konsep makro dapat di analogikan bahwa semakin besar PDRB yang di peroleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini akan mendorong pendapatan asli daerah.

²"Adanya Peningkatan Pendapatan Asli daerah di Banten"
<http://nasional.kompas.com/read/2009/11/13/16234468/www.kompas.com> (diakses tanggal 24 Februari 2012)

³"Pajak Alat Berat Perlu Dipungut" <http://www.radarbanten.com/read/berita/10/8513/Pajak-Alat-Berat-Perlu-Dipungut.html> (diakses 20 maret 2013)

Dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang telah dijelaskan di atas, yaitu jumlah penduduk, sumber pendapatan baru, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peneliti tertarik untuk meneliti jumlah penduduk dan PDRB di Banten guna menelaah keterkaitan antara jumlah penduduk dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Banten.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh jumlah penduduk bekerja akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Adanya pengaruh pendapatan baru yang ada akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
3. Adanya pengaruh produk domestik regional bruto akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyak dan kompleksnya permasalahan yang timbul dan hal ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah “Pengaruh Jumlah Penduduk Bekerja dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Banten tahun 2006-2012.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk bekerja terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk bekerja dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan penambah sumber pengetahuan baru tentang jumlah penduduk bekerja dan PDRB pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrument pemecahan masalah jumlah penduduk bekerja dan PDRB serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.